

**TELAAH KEBIJAKAN KAJIAN BANTUAN SOSIAL  
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK  
DI KELUARGA MISKIN  
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK**

dengan

**YAYASAN MELATI DELAPAN TIGA**

**Tahun 2016**



## KATA PENGANTAR

Kami panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan hidayahNya, laporan “Telaah Kebijakan Bantuan Sosial bagi Perempuan dan Anak di Keluarga Miskin di Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Seiring dengan komitmen pemerintah Indonesia terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dengan adanya kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2016 telah mencanangkan gerakan *Three Ends Plus* yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, akhiri kesenjangan ekonomi, dan akhiri ketertinggalan perempuan dalam politik. Dalam hal ini salah satu gerakan akhiri kesenjangan ekonomi dalam rangka mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan.

Laporan ini memiliki tujuan utama untuk menelaah pelaksanaan dan manfaat bantuan sosial dalam rangka program penanggulangan kemiskinan bagi perempuan dan anak pada keluarga miskin di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Disamping itu diharapkan bahwa laporan ini dapat digunakan untuk penyempurnaan penyusunan kebijakan program penanggulangan kemiskinan bagi Kementerian/Lembaga terkait, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam penyusunan laporan ini, Tim Peneliti telah berupaya untuk bekerja secara maksimal sesuai dengan tujuan penulisan. Namun demikian, masih terdapat banyak kekurangan dalam hasil kajian dan penulisan ini, baik karena berbagai keterbatasan pengetahuan Peneliti, maupun keterbatasan referensi atau sumber yang digunakan. Untuk itu, saran dan kritik dari para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dikemudian hari.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kajian dan penyusunan laporan ini. Masukan, saran dan kritik yang membangun kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan ini.

Jakarta, 11 November 2016

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Kajian.....	2
C. Manfaat Kajian.....	3
D. Hasil Yang Diharapkan.....	3
E. Ruang Lingkup.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
A. Kemiskinan .....	5
B. Strategi Penanggulangan Kemiskinan .....	7
C. Program-Program Penanggulangan Kemiskinan .....	8
1. Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga.....	8
2. Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat .....	15
3. Program Pemberdayaan Berbasis Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.....	19
BAB III METODE KAJIAN .....	21
A. Desain, Lokasi dan Waktu Kajian .....	21
B. Teknik Pengambilan Informan/Responden.....	21
C. Jenis, Cara dan Instrumen Pengumpulan Data .....	22
D. Pengolahan dan Analisis Data .....	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	24
A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	24
B. Kependudukan .....	24
C. Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan .....	26

D. Program-Program Penanggulangan Kemiskinan yang Diterima Perempuan dan Anak Keluarga Miskin.....	29
E. Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan .....	30
BAB V PENUTUP .....	38
A. Kesimpulan .....	38
B. Rekomendasi.....	38
DAFTAR PUSTAKA .....	40
LAMPIRAN.....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tahapan Keluarga Sejahtera.....	5
Tabel 3.1 Informan/Responden Kajian.....	21
Tabel 3.2 Data yang Dikumpulkan dari Informan/Responden.....	22
Tabel 4.1 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014	25
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014.....	26
Tabel 4.3 Program-Program Penanggulangan Kemiskinan di Setiap Sektor .....	26

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Risiko dan Kerentanan Bantuan Sosial.....	9
Grafik 4.1 Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan.....	29
Grafik 4.2 Anggaran dan Biaya Penyaluran Raskin.....	32

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dengan adanya kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan. Kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 4 (empat) strategi utama, yaitu perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UKM dan pembangunan infrastruktur perdesaan. Strategi utama perlindungan sosial sebagai titik dasar dalam upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama (Nainggolan dkk, 2012).

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan ada berbagai program yang diadakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin), Program Indonesia Pintar (PIP), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Jangka pendek program tersebut bertujuan untuk mengurangi beban keluarga miskin, sedangkan jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. Selain itu untuk mengurangi kemiskinan dapat diupayakan pengurangan kemiskinan komunitas dengan mengerakkan kelompok masyarakat menjadi satu-kesatuan, organisasi dan mengambil tindakan masyarakat bertujuan menciptakan pendapatan melalui pengembangan usaha mikro seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Seiring dengan komitmen pemerintah Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2016 telah mencanangkan gerakan *Three Ends Plus* yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, akhiri kesenjangan ekonomi, dan akhiri ketertinggalan perempuan dalam politik. Dalam hal ini salah satu gerakan akhiri kesenjangan ekonomi dalam rangka mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan.

Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 secara nasional jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 27.727.778 orang

(10,96%) pada September 2014 menjadi 28.592.830 orang (11,22%) pada Maret 2015, atau bertambah sebanyak 865.048 orang (0,26%). Salah satu provinsi yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin adalah NTB. Secara agregat jumlah penduduk miskin di NTB bertambah dari 816.621 orang (17,05%) pada bulan September 2014 menjadi 823.890 orang (17,10%) pada bulan Maret 2015, atau dengan kata lain jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 7.269 orang (0,05%) (Hatuina, 2015).

Atas dasar data BPS tahun 2015 yang menunjukkan bahwa NTB termasuk provinsi kategori sepuluh besar penduduk miskin tertinggi di Indonesia (Hatuina, 2015). Sementara tingkat kemiskinan Kabupaten Lombok Timur tahun 2014 berada pada zona merah (19%) yang artinya masih berada di atas angka kemiskinan nasional (10,96%). Kabupaten Lombok Timur mempunyai penduduk sebanyak 1.153.773 orang yang terdiri dari laki-laki 537.152 orang dan perempuan 616.621 orang (Bappeda Kab. Lotim, 2015). Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten terpadat penduduknya dan proporsi penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Oleh karena itu, Kabupaten Lombok Timur perlu mendapat sorotan dalam hal program penanggulangan kemiskinan.

Mengingat sampai saat ini belum pernah ada hasil pemetaan maupun hasil evaluasi dari berbagai program bantuan sosial, khususnya dampak yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi keluarga miskin. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap bantuan sosial yang sudah menjadi kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan terlebih dahulu guna melakukan pemetaan bantuan sosial bagi perempuan dan anak pada keluarga miskin.

## **B. Tujuan Kajian**

Secara umum kajian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan dan manfaat bantuan sosial dalam rangka program penanggulangan kemiskinan bagi perempuan dan anak pada keluarga miskin di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Secara khusus kajian ini bertujuan teridentifikasinya:

1. Program bantuan sosial yang ada di Kabupaten Lombok Timur,
2. Pelaksanaan program bantuan sosial di Kabupaten Lombok Timur, dan



3. Kegunaan dan manfaat program bantuan sosial yang ada di Kabupaten Lombok Timur bagi perempuan dan anak.

### **C. Manfaat Kajian**

Manfaat dari kajian tentang bantuan sosial bagi perempuan dan anak pada keluarga miskin ini adalah diperolehnya informasi tentang kebijakan dan pelaksanaan bantuan sosial bagi perempuan dan anak agar dapat digunakan untuk penyempurnaan penyusunan kebijakan bagi Kementerian/Lembaga terkait, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **D. Hasil Yang Diharapkan**

Kajian ini diharapkan dapat mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Gambaran sistem pendataan rumah tangga sasaran (RTS) di lapangan,
2. Ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan, dan
3. Rumusan rekomendasi sebagai upaya strategis kemudahan akses terhadap program penanggulangan kemiskinan bagi perempuan dan anak.

### **E. Ruang Lingkup**

Untuk mempermudah penulisan laporan kajian ini dan lebih terarah, maka perlu suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini, yaitu:

1. Program bantuan sosial yang ada bagi perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur,
2. Pelaksanaan program bantuan sosial bagi perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur, dan
3. Kegunaan dan manfaat program bantuan sosial bagi perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur

## **F. Rumusan Masalah**

Belum ada hasil pemetaan maupun hasil evaluasi dari berbagai program penanggulangan kemiskinan, khususnya dampak yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi keluarga miskin di Kabupaten Lombok Timur.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang (laki-laki dan perempuan) tidak terpenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. Dimensi kemiskinan terbagi atas ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang dan papan), tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi), tidak adanya jaminan masa depan (tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga), kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massa, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber alam, tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat, tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental serta ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompo marjinal dan terpecil) (Suharto, dkk., 2004).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai kemiskinan dari sisi kesejahteraan. Data kemiskinan dilakukan melalui tahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu: Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I (miskin), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III plus. Hal ini dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 2.1 (BKKBN, 2011)

**Tabel 2.1 Tahapan Keluarga Sejahtera**

Tahap	Deskripsi	Indikator	
		Ekonomi	Non Ekonomi
Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin)	Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makan dua kali atau lebih sehari</li> <li>• Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya: di rumah, bekerja/ sekolah dan bepergian)</li> <li>• Bagian terlalu luas lantai rumah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan ibadah</li> <li>• Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan</li> </ul>

		bukan dari tanah (misalnya: bambu/kayu berkualitas rendah).	
Keluarga Sejahtera I (Miskin)	Keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur</li> <li>• Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru</li> <li>• Luas lantai rumah paling sedikit 8m<sup>2</sup> untuk tiap orang/ penghuni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibadah teratur</li> <li>• Sehat tiga bulan terakhir (sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik).</li> <li>• Punya penghasilan tetap</li> <li>• Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin</li> <li>• Usia 6-15 tahun bersekolah</li> <li>• Anak lebih dari 2 orang, ber-KB</li> </ul>
Keluarga Sejahtera II	Keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki tabungan keluarga / barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya</li> <li>• Rekreasi bersama (6 bulan sekali)</li> <li>• Meningkatkan pengetahuan agama</li> <li>• Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah</li> <li>• Menggunakan sarana transportasi</li> </ul>	
Keluarga Sejahtera III	Sudah dapat memenuhi beberapa indicator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki tabungan keluarga</li> <li>• Makan bersama sambil berkomunikasi</li> <li>• Mengikuti kegiatan masyarakat</li> <li>• Rekreasi bersama (6 bulan sekali)</li> <li>• Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah</li> <li>• Menggunakan sarana transportasi</li> </ul>	
	Belum dapat memenuhi beberapa indicator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktif memberikan sumbangan material secara teratur</li> <li>• Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan</li> </ul>	
Keluarga Sejahtera III Plus	Sudah dapat memenuhi indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktif memberikan sumbangan material secara teratur</li> <li>• Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.</li> </ul>	

Sedangkan BPS memiliki standar 14 kriteria miskin (minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin), yaitu (Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 2014):

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/ sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

## **B. Strategi Penanggulangan Kemiskinan**

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10%

pada akhir tahun 2014. Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

1. Menyempurnakan program perlindungan sosial
2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
3. Pemberdayaan masyarakat, dan
4. Pembangunan yang inklusif

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan tiga klaster, yaitu:

1. Klaster I: Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
2. Klaster II: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
3. Klaster III: Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

### **C. Program-Program Penanggulangan Kemiskinan**

#### **1. Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga**

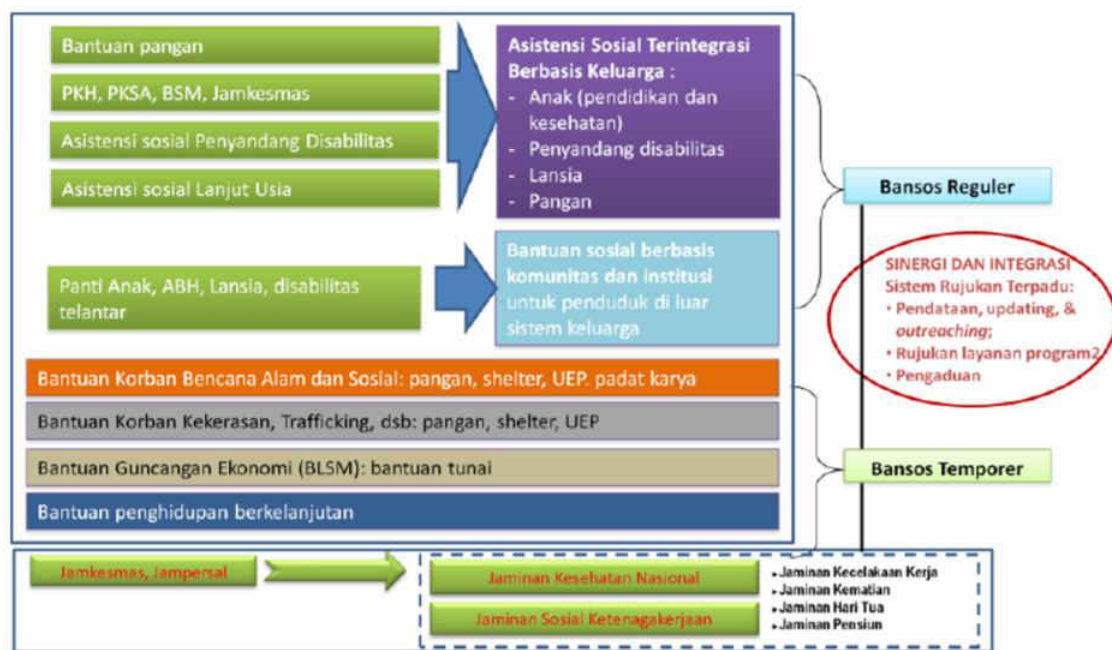
Bantuan sosial sebagai program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, memenuhi tingkat minimum nutrisi atau membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada (FAO, 2003).

Bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (*in-cash transfers*), juga dalam bentuk barang dan pelayanan (*in-kind transfers*). Setiap bantuan bisa bersifat sementara, karena adanya situasi sosial tertentu seperti; bencana, resesi ekonomi, atau adanya kebijakan pemerintah tertentu. Selain itu bantuan juga dapat bersifat tetap khususnya bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak telantar. Secara konseptual bantuan sosial dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan telantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (*basic living needs*), sehingga dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia.

Kerangka bantuan sosial berfokus pada penanggulangan risiko dan kerentanan yang dihadapi baik oleh individu, keluarga, maupun komunitas. Risiko dan kerentanan ini terdiri dari dua bentuk, yaitu:

- 1) Risiko dan kerentanan yang datang dari dalam, atau dikenal dengan kerentanan siklus hidup dan bersifat permanen sehingga akan ditangani dengan program bantuan sosial yang bersifat reguler.
- 2) Risiko dan kerentanan yang datang dari luar, misalnya disebabkan oleh bencana alam, guncangan ekonomi, dan guncangan sosial. Risiko semacam ini ditangani dengan program bantuan sosial yang bersifat temporer sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah.

**Grafik 2.1 Risiko dan Kerentanan Bantuan Sosial**



Sumber: Bappenas, 2014

a. Program Bantuan Sosial Reguler

1) Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak

Salah satu program bantuan sosial prioritas nasional dan dikemas dalam bentuk Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini ditargetkan kepada anak-anak yang memiliki kehidupan yang tidak layak dan menghadapi permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tindak

kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi. Bantuan yang diberikan kepada penerima meliputi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan aksesibilitas terhadap akses pelayanan sosial dasar seperti akte kelahiran, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan air bersih, rekreasi, keterampilan, penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial anak.

## 2) Pelayanan Sosial dan Bantuan Bagi Penduduk Lanjut Usia Usaha

Perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi penduduk lanjut usia dilakukan melalui pelayanan dalam panti, luar panti, kelembagaan lanjut usia dan perlindungan sosial, serta aksesibilitas untuk lanjut usia. Sistem pelayanan dalam panti meliputi pelayanan sosial reguler dalam panti, pelayanan harian (*day care*), subsidi silang, subsidi panti, dan multi layanan serta rujukan. Sistem pelayanan luar panti meliputi pendampingan dan perawatan lanjut usia di rumah (*home care*), *foster care*, pelayanan harian (*day care services*), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), KUBe, serta pembinaan UEP menjelang purnakaryawan (pralanjut usia). Disamping pelayanan-pelayanan tersebut, terdapat jenis program lainnya seperti kegiatan kelembagaan yang meliputi perintisan dan penguatan jejaring antar lembaga nasional dan internasional, koordinasi antar- dan intersektor, dan penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional dan Internasional; Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT), yakni perlindungan sosial untuk lanjut usia telantar yang diberikan dalam bentuk bantuan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang semula bernama Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) serta program pelayanan kedaruratan, yakni pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia dalam situasi darurat.

## 3) Pelayanan, Rehabilitasi, dan Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Secara umum program pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk masyarakat penyandang disabilitas dilakukan melalui *institutional-based* program, *non-institutional-based* program, serta jenis pelayanan sosial lainnya. *Institutional-based* program mencakup program reguler, multi layanan, dan



multi target group melalui *day care* serta subsidi silang, dan program khusus yang meliputi *outreach* (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat. *Non-institutional-based* program mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan *family-based* dan *community-based* yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM). Sedangkan pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya (LBK), Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE). Bantuan terhadap masyarakat penyandang disabilitas juga diberikan dalam bentuk uang tunai melalui program Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ASODK), yang semula bernama Jaminan Sosial Penyandang Cacat (JSPACA). Pemberian bantuan dana tunai bagi penyandang disabilitas berat ini telah dimulai sejak tahun 2006, dan pada tahun 2013 tersebar di 33 Provinsi yang mencakup 322 Kabupaten/Kota dengan jumlah penerima sebanyak 22.000 orang penyandang disabilitas berat. Tujuan dari bantuan tunai ini adalah untuk pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diarahkan pada perlindungan dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas yang sudah tidak bisa direhabilitasi dan diberdayakan.

#### 4) Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebuah program bantuan tunai bersyarat yang ditargetkan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan mensyaratkan ketentuan pendidikan dan kesehatan. Tujuan PKH dalam jangka pendek adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga RTSM, dan dalam jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan pada kelompok masyarakat miskin. Dalam program ini, rumah tangga yang memenuhi kriteria akan mendapatkan bantuan tunai jika mereka memenuhi persyaratan pendidikan atau kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerima manfaat tersebut minimal memenuhi salah satu dari tiga kondisi yang dipersyaratkan: memiliki ibu hamil/nifas, memiliki anak balita atau anak

prasekolah, dan/atau memiliki anak usia SD, SMP, atau anak berusia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Mulai pelaksanaan tahun 2012, basis program yang digunakan dalam PKH adalah keluarga, menggantikan rumah tangga sebagai basis program sebelumnya.

5) Program Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin)

Salah satu program bantuan sosial nasional yang berbasis keluarga. Program ini merupakan kelanjutan dari program Operasi Pasar Khusus (OPK) pada masa krisis ekonomi 1997-1998 dan memiliki tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok. Bantuan yang diberikan dalam program raskin berupa subsidi bahan pangan pokok, yakni beras. Pemilihan beras bersubsidi sebagai jenis bantuan dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokoknya, dan dengan hal tersebut diharapkan beban pengeluaran rumah tangga miskin untuk pemenuhan kebutuhan pokok dapat berkurang. Program ini juga diharapkan dapat membantu kelompok miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan nutrisi karbohidrat yang cukup. Melalui program ini, masyarakat yang memenuhi kriteria dapat membeli beras raskin dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.

6) Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Siswa Miskin, dan Bidikmisi

Pada masa krisis 1997-1998 pemerintah memiliki program JPS bidang pendidikan, pada era selanjutnya pemerintah memiliki program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan program bantuan pada sektor pendidikan yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun. Bantuan yang diberikan dalam program BOS berupa dana operasional nonpersonalia. Dana BOS disalurkan kepada seluruh sekolah tingkat SD dan SMP di Indonesia, termasuk SMP Terbuka dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM). Program bantuan lain dari pemerintah dalam bidang pendidikan adalah program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Meski pemerintah

telah melaksanakan program BOS, masyarakat miskin masih dapat menemui halangan dalam melanjutkan pembiayaan pendidikan anaknya. Besarnya biaya pendukung pendidikan seperti biaya baju seragam, buku, dan transportasi kerap menjadi beban penghalang bagi keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga miskin. Program BSM bertujuan untuk menghilangkan halangan bagi siswa-siswa miskin tersebut untuk melanjutkan pendidikannya. Perlu diingat bahwa BSM adalah sebuah program bantuan langsung, bukan merupakan program beasiswa. Penentuan penerima BSM bukan berdasarkan kepada kondisi prestasi siswa, melainkan hanya bergantung kepada kondisi ekonomi siswa. Selain program BOS dan BSM, pemerintah juga memiliki program bantuan pendidikan untuk tingkat pendidikan tinggi. Bantuan tersebut dikenal dengan sebutan Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi). Program ini diperuntukkan bagi lulusan sekolah tingkat menengah atas yang tergolong miskin yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan tinggi. Bantuan yang diberikan bagi penerima Bidikmisi mencakup pembebasan biaya kuliah serta bantuan biaya hidup selama periode normal perkuliahan.

7) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Salah satu kelompok sasaran dari program pemberdayaan sosial di Indonesia. Program pemberdayaan KAT bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan KAT secara bertahap sehingga mereka memperoleh penghidupan dan kesempatan seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Pelaksanaan program pemberdayaan KAT melibatkan masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah daerah. Program bantuan pemberdayaan yang diberikan meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan lingkungan sosial, pemberdayaan kelembagaan, serta perlindungan dan advokasi.

b. Program Bantuan Sosial Temporer

1) Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Beberapa jenis program bantuan sosial dilaksanakan secara temporer, seperti program bantuan terhadap korban bencana. Klasifikasi bencana yang

ditangani secara umum dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni bencana alam, bencana non-alam, serta bencana sosial. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok, konflik antarkomunitas, dan teror. Jenis bantuan yang diberikan diantaranya bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, serta bantuan penguatan kelembagaan. Bantuan-bantuan sosial tersebut secara umum ditangani oleh dua lembaga, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial.

## 2) Bantuan Sosial untuk Bencana/Guncangan Ekonomi

Pemerintah Indonesia telah beberapa kali meluncurkan skema bantuan sosial sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dimana kenaikan harga BBM tersebut dapat tergolong sebagai guncangan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan. Skema bantuan yang diberikan berupa bantuan tunai, atau *unconditional cash transfer*, dan bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan atas guncangan ekonomi yang terjadi. Saat terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2005 dan 2009, bantuan yang diberikan bertajuk Bantuan Langsung. Saat kenaikan harga BBM bersubsidi kembali terjadi pada tahun 2013, bantuan yang diberikan bertajuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Bantuan tunai tersebut bersifat sementara, diberikan kepada keluarga miskin dan rentan selama periode waktu yang ditentukan atau sampai dengan dampak guncangan ekonomi berkurang.

## **2. Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah diluncurkan Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Sulawesi Tengah merupakan representasi dari kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (Klaster 2) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata pemerintahan daerah dan menciptakan aset untuk kelompok miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat dicirikan dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan kegiatan program dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat.

Adapun kebijakan program yang masuk dalam kelompok pemberdayaan masyarakat antara lain berupa (TKPKD, 2015):

### **1. PNPM Perkotaan**

PNPM Mandiri Perkotaan atau Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara mandiri. Program ini bertujuan:

- a. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya,

- b. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat, dan
- c. Mengedepankan peran Pemerintah Kota/Kabupaten agar mereka makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengkohan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat.

## 2. PNPM Perdesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. PNPM perdesaan dilaksanakan merupakan keberlanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998.

## 3. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

PISEW adalah program yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Adapun tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan daerah pedesaan, memperbaiki pengelolaan pemerintah (*local governance*) dan penguatan institusi di pedesaan.

## 4. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)

Program P2DTK adalah penanggulangan kemiskinan dengan sasaran daerah tertinggal dan daerah khusus yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal) untuk meningkatkan kapasitas sosial-ekonomi daerah melalui pendekatan pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi di daerah-daerah tertinggal dan khusus.

## 5. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

PUAP merupakan program Kementerian Pertanian bagi petani di pedesaan dengan tujuan:

- a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah,
  - b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia Mitra Tani,
  - c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, dan
  - d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.
6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP)

PNPM Mandiri-KP adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir atau masyarakat nelayan pada sektor kelautan dan perikanan. Tujuan Program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat yang mencari nafkah di bidang kelautan dan perikanan (warga yang tinggal di wilayah pesisir atau di luar pesisir yang memiliki kegiatan di bidang kelautan dan perikanan).

7. PNPM Mandiri Pariwisata

PNPM Mandiri Pariwisata adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berupaya membantu masyarakat miskin yang tinggal di sekitar wilayah destinasi pariwisata. Desa-desa miskin yang menjadi sasaran PNPM Mandiri Pariwisata adalah desa-desa yang memiliki potensi pengembangan kegiatan kepariwisataan, dekat dengan Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) maupun fasilitas pendukung pariwisata. Tujuan dari program ini adalah untuk:

- a. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam industri pariwisata melalui konsep simplifikasi perizinan dan insentif perpajakan bagi investor,
- b. Mendorong pertumbuhan daya tarik wisata unggulan di setiap provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat,

- c. Pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing-masing destinasi pariwisata,
  - d. Revitalisasi dan pembangunan kawasan pariwisata baru, termasuk pula prasarana dan sarana dasarnya (seperti jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih dan sarana kesehatan),
  - e. Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata dalam membangun produk pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata),
  - f. Pemberian perhatian khusus kepada pengembangan kawasan ekowisata dan wisata bahari terutama di lokasi-lokasi yang mempunyai potensi obyek wisata alam bahari yang sangat besar, dan
  - g. Pengembangan pariwisata yang berdaya saing melalui terbangunnya komitmen nasional agar sektor-sektor di bidang keamanan, hukum, perbankan, perhubungan dan sektor terkait lainnya dapat memfasilitasi berkembangnya kepariwisataan terutama pada wilayah-wilyah yang memiliki destinasi pariwisata unggulan, harmonisasi dan simplifikasi perangkat peraturan baik di tingkat pusat, daerah dan antara pusat dan daerah, memformulasi, menerapkan dan mengawasi standar industri pariwisata yang dibutuhkan.
8. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

PLPBK merupakan kelanjutan dari transformasi sosial dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Beberapa prinsip dasar yang digunakan P2KP seperti demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi, diterapkan pula dalam pelaksanaan PLPBK. Pembangunan manusia menjadi fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan yang dicerminkan melalui pembangunan bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan (SEL). Intervensi kegiatan PLPBK difokuskan pada kegiatan penataan lingkungan pemukiman miskin di perkotaan melalui pendekatan Tridaya secara komprehensif dan terpadu. Lingkungan pemukiman tersebut ditata kembali menjadi lingkungan pemukiman yang teratur, aman, dan sehat dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang mendukung pembangunan SEL menjadi media belajar bersama antara masyarakat



dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli/pemangku kepentingan dalam memperkuat kemandirian pengelolaan lingkungan pemukiman ditingkat kelurahan.

### **3. Program Pemberdayaan Berbasis Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil**

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah (TNP2K, 2014):

a. Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro

Kelompok program ini merupakan pengembangan dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri, dalam pengertian bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal melalui lembaga keuangan/perbankan yang dijamin oleh Pemerintah.

b. Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar

Memberikan akses yang luas dalam berusaha serta melakukan penetrasi dan perluasan pasar, baik untuk tingkat domestik maupun internasional, terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha.

c. Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha

Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen berusaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro.

Cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat dibagi atas 3 (tiga), yaitu:

a. Pembiayaan atau bantuan permodalan,

b. Pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk, dan

c. Pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha.

Penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam ekonomi.

## BAB III

### METODE KAJIAN

#### A. Desain, Lokasi dan Waktu Kajian

Kajian ini memiliki desain deskriptif kualitatif. Pelaksanaan kajian dilakukan di tingkat pusat yang bertempat di KPPPA tanggal 29 Juli 2016, tingkat provinsi bertempat di kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) tanggal 8 Agustus 2016, tingkat kabupaten bertempat di kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) tanggal 9 Agustus 2016, tingkat kecamatan bertempat di kantor Kecamatan Suralaga tanggal 9 Agustus 2016 dan tingkat desa bertempat di kantor Kecamatan Suralaga tanggal 10 Agustus 2016.

#### B. Teknik Pengambilan Informan/Responden

Kajian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive sampling* yang didasarkan pada tingginya angka kemiskinan dan proporsi penduduk perempuan. Kabupaten terpilih selanjutnya dipilih satu kecamatan dengan kriteria yang sama. Pada kajian ini dipilih Kecamatan Suralaga merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan dana PNPM mandiri khususnya Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) dan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Berikut ini informan/responden dalam kajian ini:

**Tabel 3.1 Informan/Responden Kajian**

	<b>Informan/Responden</b>
Tingkat Pusat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak (KPPPA),</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum &amp; Perumahan Rakyat,</li><li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),</li><li>• Kementerian Pariwisata (Kemenpar),</li><li>• Kementerian Koperasi &amp; UKM,</li><li>• Badan Pusat Statistik (BPS),</li><li>• Kementerian Sosial (Kemensos), dan</li><li>• Kementerian Dalam Negeri (Kemendag)</li></ul>
Tingkat Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Koperasi &amp; UMKM,</li><li>• Badan Pusat Statistik (BPS),</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora),</li> <li>• Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU),</li> <li>• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),</li> <li>• Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB),</li> <li>• Dinas Kesehatan (Dinkes),</li> <li>• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), dan</li> <li>• Dinas Sosial (Dinsos)</li> </ul>
Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora),</li> <li>• Dinas Koperasi &amp; UMKM,</li> <li>• Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten,</li> <li>• Dinas Kesehatan (Dinkes),</li> <li>• Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans),</li> <li>• Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), dan</li> <li>• Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)</li> </ul>
Tingkat Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas Lapangan SKPD,</li> <li>• Pelaksana Bantuan sosial tingkat Kecamatan dan</li> <li>• Pendamping Bantuan social</li> </ul>
Tingkat Desa	Perempuan dari keluarga miskin yang pernah/sedang menerima program penanggulangan kemiskinan yang berjumlah 25 responden.

### C. Jenis, Cara dan Instrumen Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode FGD di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan serta wawancara terstruktur yang menggunakan daftar pertanyaan pada sasaran (perempuan keluarga miskin), sedangkan data sekunder dikumpulkan dokumen-dokumen terkait program penanggulangan kemiskinan.

**Tabel 3.2 Data yang Dikumpulkan dari Informan/Responden**

	<b>Data yang dikumpulkan</b>
Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk bantuan sosial,</li> <li>• Tahun pelaksanaan,</li> <li>• Sasaran dan mekanisme kerja program bantuan sosial,</li> <li>• Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana program bantuan sosial,</li> <li>• Koordinasi dengan K/L terkait,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendala yang dihadapi</li> </ul>
Tingkat Kecamatan dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program bantuan sosial yang ada di kecamatan dan desa</li> <li>• Pelaksanaan bantuan sosial</li> </ul>
Sasaran (perempuan keluarga miskin)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program bantuan sosial yang diterima,</li> <li>• Waktu penerimaan,</li> <li>• Besaran nominal bantuan sosial,</li> <li>• Kegunaan dan manfaat program bantuan sosial bagi perempuan dan anak keluarga miskin</li> </ul>

#### **D. Pengolahan dan Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah *Gender Analyze Pathway* (GAP) dimana analisis dimulai dari kebijakan yang tertinggi mengenai program penanggulangan kemiskinan (Kementerian/Lembaga) hingga yang terendah yaitu pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan (kecamatan/SKPD).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Kabupaten Lombok Timur terletak pada 116°-117° Bujur Timur dan 8°-9° Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara dengan : Laut Bali/Laut Jawa

Sebelah Selatan dengan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat dengan : Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara

Sebelah Timur dengan : Selat Alas (Pulau Sumbawa)

Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 1.605,55 km<sup>2</sup> (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 km<sup>2</sup> (40,09%). Luas daratan Kabupaten Lombok Timur mencakup 33,88% dari luas Pulau Lombok atau 7,97% dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketinggian topografi di Kabupaten Lombok Timur cukup bervariasi mulai dari 0 meter di atas permukaan laut yang merupakan dataran pantai bagian selatan Kabupaten Lombok Timur hingga 3.775 mdpl yang berupa areal pegunungan (kompleks Rinjani) di bagian utaranya.

Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 kecamatan, 239 desa dan 15 kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu kecamatan Sambelia ± 245,22 km<sup>2</sup> (15,27% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Timur), sedangkan wilayah kecamatan yang tersempit adalah kecamatan Sukamulia ± 14,49 km<sup>2</sup> (0,9% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Timur).

Karakteristik potensi sumber daya alam meliputi kelautan, pertanian, industri pariwisata dan transportasi laut.

Kabupaten Lombok Timur beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 20°-33°C dengan rata-rata curah hujan 10 hari setiap bulannya selama tahun 2013.

#### **B. Kependudukan**

Jumlah penduduk kabupaten Lombok Timur menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari 1.109.253 jiwa pada tahun 2010 menjadi 1.153.773 jiwa pada tahun 2014.

Menurut jenis kelamin, penduduk Lombok timur tahun 2014 terdiri dari 537.152 laki-laki dan 616.621 perempuan.

Lombok timur memiliki 20 kecamatan yang diantaranya tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak tahun 2014 adalah kecamatan Masbagik, Aikmel dan Pringgabaya. Sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah kecamatan Sembalun, Sambalia dan Sukamulia.

**Tabel 4.1 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Keruak	48.875	49.381	49.886	50.374	50.837
2	Jerowaru	54.937	55.507	56.076	56.624	57.144
3	Sakra	53.157	53.708	54.257	54.787	55.290
4	Sakra Barat	47.377	47.867	48.357	48.829	49.277
5	Sakra Timur	41.265	41.693	42.119	42.529	42.920
6	Terara	65.120	65.795	66.469	67.119	67.735
7	Montong Gading	40.191	40.606	41.021	41.422	41.802
8	Sikur	66.651	67.341	68.029	68.692	69.323
9	Masbagik	94.361	95.339	96.315	97.257	98.151
10	Pringgasela	50.226	50.746	51.265	51.765	52.241
11	Sukamulia	30.363	30.678	30.991	31.294	31.581
12	Suralaga	51.284	51.817	52.347	52.858	53.343
13	Selong	84.535	85.411	86.285	87.128	87.929
14	Labuhan Haji	53.333	53.886	54.437	54.970	55.474
15	Pringgabaya	89.820	90.753	91.681	92.576	93.427
16	Suela	36.998	37.382	37.764	38.133	38.483
17	Aikmel	93.203	94.168	95.131	96.060	96.942
18	Wanasaba	58.739	59.348	59.953	60.539	61.095
19	Sembalun	18.821	19.016	19.211	19.399	19.577
20	Sambelia	29.997	30.308	30.619	30.918	31.202
<b>JUMLAH</b>		1.109.253	1.120.750	1.132.213	1.143.273	1.153.773

*Sumber: BPS Kab. Lombok Timur, 2015*

Proporsi penduduk di wilayah Kabupaten Lombok Timur tahun 2014 dilihat dari golongan umur menunjukkan bahwa penduduk kelompok usia 0-4 tahun merupakan proporsi terbesar yaitu sebanyak 125.438 jiwa dan terkecil adalah kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebanyak 16.356 jiwa. Selain berdasarkan kelompok umur diketahui juga proporsi antara penduduk laki-laki dan perempuan yaitu sebesar 87,11 (laki-laki sebanyak 537.152 jiwa dan perempuan sebanyak 616.621 jiwa).

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014**

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Penduduk			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	0-4	63.925	61.558	125.483	103,85
2	5-9	61.637	58.992	120.559	104,61
3	10-14	56.107	54.592	110.699	102,78
4	15-19	52.413	54.270	106.683	96,58
5	20-24	41.758	54.580	96.338	76,51
6	25-29	38.303	54.402	92.705	70,41
7	30-34	36.398	51.988	88.386	70,01
8	35-39	35.767	47.881	83.648	74,70
9	40-44	32.829	41.234	74.063	79,62
10	45-49	28.536	35.602	64.138	80,15
11	50-54	25.933	30.235	56.168	85,77
12	55-59	21.225	23.354	44.579	90,88
13	60-64	16.441	17.227	33.668	95,44
14	65-69	11.116	12.276	23.392	90,55
15	70-74	7.579	8.777	16.356	86,35
16	75+	7.185	9.723	16.908	73,90
Jumlah		537.152	616.621	1.153.773	87,11

*Sumber: BPS Kab. Lombok Timur, 2015*

**C. Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan**

**Tabel 4.3 Program-Program Penanggulangan Kemiskinan di Setiap Sektor**

Program-program penanggulangan kemiskinan yang diadakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koperasi wanita,</li> <li>• Pengembangan desa wisata dan peningkatan fasilitas <i>homestay</i>,</li> <li>• Pendidikan keaksaraan dasar dan lanjutan,</li> <li>• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri berupa fasilitas sanitasi, air bersih dan rumah tidak layak huni,</li> <li>• Program Keluarga Harapan (PKH),</li> <li>• Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP),</li> <li>• PBI JKN melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan</li> <li>• Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin).</li> </ul>
Program-program penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS),</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan keterampilan untuk kader perempuan (perempuan kepala keluarga, remaja lulus sekolah belum mendapat pekerjaan, mantan TKW),</li> <li>• Bantuan rumah tidak layak huni,</li> <li>• Bantuan pembuatan fasilitas umum (MCK),</li> <li>• Bantuan peralatan nelayan (jaring),</li> <li>• Pengembangan koperasi wanita,</li> <li>• Pendidikan berupa kecakapan kerja dan wirausaha, dan</li> <li>• Bantuan modal kerja berupa dana dan peralatan.</li> </ul>
Program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan kewirausahaan: tata boga, tata rias;</li> <li>• Kecakapan hidup perempuan,</li> <li>• Pendidikan keterampilan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual serta mantan TKW,</li> <li>• Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan</li> <li>• Program Keluarga Harapan (PKH).</li> </ul>
Program-program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Suralaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Keluarga Harapan (PKH),</li> <li>• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN),</li> <li>• Program Indonesia Pintar (PIP),</li> <li>• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan</li> <li>• Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM).</li> </ul>

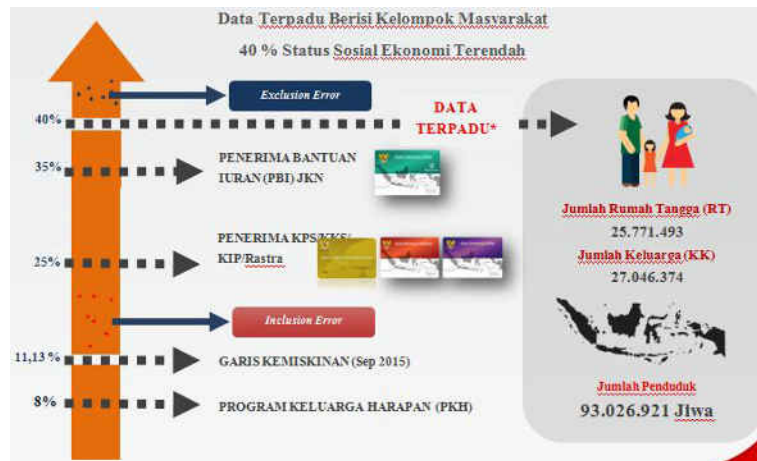
Dengan adanya otonomi daerah, struktur organisasi yang tidak vertikal maka nomenklturnya akan berbeda-beda baik di pusat, provinsi maupun kabupaten, seperti Kementerian Sosial di pusat, provinsi dinas sosial dan kabupaten dinas sosial ketenagakerjaan dan transmigrasi (dinsosnakertrans). Hal ini yang menyebabkan ada beberapa kebijakan-kebijakan program penanggulangan kemiskinan berbeda antara di tingkat pusat dan daerah tergantung kebutuhan daerah tersebut.

Semua Kementerian/Lembaga memiliki program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Program penanggulangan kemiskinan dapat berbentuk bantuan langsung tunai, barang/peralatan, pelayanan, dan keterampilan/pelatihan. Bantuan langsung tunai ada dua, yaitu bantuan hibah (berbasis individu/keluarga) dan bantuan dana bergulir (pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok). Jenis bantuan hibah yang ada yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), sanitasi layak (jamban sehat) dan perbaikan

rumah tidak layak huni (Rutilahu). Sedangkan program bantuan dana bergulir digunakan untuk modal usaha dan koperasi seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Bantuan hibah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari/dasar, melaksanakan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah dan bagi anak yang putus sekolah diberikan keterampilan/pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).

Sasaran di setiap program penanggulangan kemiskinan ada yang individu/keluarga dan kelompok/masyarakat yang dikategorikan sebagai rumah tangga miskin (RTM). Penentuan RTM didasarkan pada basis data terpadu (BDT) yang bersumber dari Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Rumah tangga dikategorikan sebagai RTM apabila rumah tangga tersebut berada di posisi 40% status sosial ekonomi terendah setelah dirangking. Pada BDT dilakukan pemutakhiran garis kemiskinan pada tahun 2015, sementara penentuan RTM *by name by address* didasarkan pada hasil PPLS 2011. Keluaran proses pendataan tersebut adalah Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Jika dilihat rentang waktu antara pelaksanaan PPLS 2011 dengan pelaksanaan penyaluran program penanggulangan kemiskinan cukup lama. Dalam rentang waktu tersebut banyak hal yang dapat terjadi pada setiap rumah tangga seperti meninggal, kehilangan/mendapatkan pekerjaan, kesehatan (status gizi) dan perubahan ekonomi keluarga. Hal ini dapat menyebabkan program penanggulangan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran sehingga tujuan program tidak tercapai. Selain itu kepala rumah tangga perempuan (PEKA) miskin, lebih miskin dibandingkan dengan kepala rumah tangga laki-laki miskin. Hal ini disebabkan oleh peran perempuan (isteri) dapat membantu ekonomi keluarga, sedangkan PEKA memiliki peran ganda dalam rumah tangga.

**Grafik 4.1 Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan**



Sumber: TNP2K, 2016

Pada grafik diatas menunjukkan garis kemiskinan pada September 2015 sebesar 11,13%. Rumah tangga yang berhak menjadi rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) berada pada posisi 40% dari status sosial ekonomi terendah. RTS PM sebesar 8% yang mendapatkan program keluarga harapan (PKH), 25% mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Raskin serta 35% mendapatkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

Mekanisme penyaluran dana bantuan melalui kartu perlindungan sosial (KPS) yang disalurkan oleh PT. Pos Indonesia dilakukan sesuai dengan daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). RTS-PM yang memperoleh KPS berhak mendapat PKH, KIP, PBI JKN dan Raskin.

#### **D. Program-Program Penanggulangan Kemiskinan yang Diterima Perempuan dan Anak Keluarga Miskin**

Berdasarkan temuan di lapangan pada perempuan penerima bantuan yang diwawancarai mendapatkan program penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

1. Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin)
2. Program Keluarga Harapan (PKH),
3. Program Indonesia Pintar (PIP),
4. Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN,
5. Bantuan Langsung Tunai (BLT),

6. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM),
7. Bantuan sanitasi (jamban sehat),
8. Bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu/perbaiki rumah),
9. Pelatihan buta aksara (pendidikan keaksaraan dasar, keaksaraan lanjutan contoh membaca resep),
10. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (PKKPMP2B), dan
11. Simpan Pinjam Perorangan (SPP)/PNPM mandiri

## **E. Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan**

### **1. Perlindungan Sosial (Bantuan Sosial)**

Dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), Pemerintah Indonesia menerbitkan kartu yang bernama Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Dengan memiliki KPS, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial antara lain:

#### **a) Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin)**

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpendapatan rendah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran. Tujuan pemberian raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan memastikan keluarga miskin/RTS mendapatkan cukup pangan dan nutrisi karbohidrat (Kemensos, 2015).

Rumah Tangga yang berhak menerima beras raskin, atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) program raskin adalah 15,5 juta Rumah Tangga (25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah) (Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi BBM, 2013). Berdasarkan data Bappeda Kab. Lombok Timur tahun 2015 RTS-PM raskin berjumlah 137.973 (40,7%) dari 338.548 total rumah tangga. Sementara jumlah RTS-PM raskin di Kecamatan Suralaga

berjumlah 7.437 (45,2%) dari total rumah tangga sebanyak 16.445 (Bappeda Kab. Lotim, 2015).

Manfaat raskin adalah memenuhi kebutuhan pangan RTS 15 kg/bulan atau 180 kg/tahun (39,5% dari kebutuhan pangan RTS/bulan), stabilisasi harga pangan, mengendalikan inflasi dan menjaga stok pangan nasional, meningkatkan ketahanan pangan di tingkat RTS sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, pasar bagi petani dan pertumbuhan ekonomi di daerah (Kemensos, 2015). Namun pada kenyataannya, jumlah berat beras yang diterima oleh RTS-PM sebanyak 3-5 kg. Hal ini disebabkan karena beras yang diterima oleh RTS-PM dibagi rata lagi ke keluarga yang tidak terdaftar agar tidak terjadi kecemburuan sosial (iri hati). Kualitas beras yang diterima seringkali kurang baik seperti banyak kutu dan kotoran (kerikil) sehingga tidak layak diolah menjadi nasi. Oleh karena itu, dengan adanya pemberian raskin ini tidak begitu terasa manfaatnya bagi RTS-PM, khususnya perempuan dan anak.

Alokasi penerima Raskin pada tahun 2015 didasarkan pada data Rumah Tangga Sasaran (RTS) bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) yang telah dimutakhirkan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pendataan RTS telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu: Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) pada tahun 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008, dan yang terakhir PPLS pada tahun 2011. Penggunaan data tersebut menjadi tidak valid karena perkembangan ekonomi keluarga dapat terus berubah setiap saat sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data RTS melalui Musyawarah desa/kelurahan dengan pengecekan kembali ke RTS secara rutin dan RTS melapor secara aktif ke desa/kelurahan mengenai perkembangan kondisi ekonomi rumah tangga/keluarga.

Harga tebus Raskin adalah Rp. 1600,-/kg di titik distribusi. Biaya pengiriman dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Harga pembelian Raskin adalah Rp. 8.325,-/kg dengan harga tebus yang dibayar RTS sebesar Rp. 1600,-/kg, pemerintah membayar subsidi Raskin sebesar Rp.

6.725,-/kg (Kemensos, 2015). Namun pada kenyataannya, harga tebus Raskin yang dibayarkan oleh RTS-PM sebanyak Rp. 10.000-Rp. 12.000 untuk mendapatkan Raskin seberat 3-5 kg.

**Grafik 4.2 Anggaran dan Biaya Penyaluran Raskin**



Sumber: Kemensos, 2015

b) Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan anak usia sekolah setingkat SD-SMP. Semua responden menggunakan dana sesuai dengan tujuan diberikannya PKH yaitu untuk mempertahankan kehidupan (*life survival*) dalam kebutuhan dasar terutama pendidikan dan kesehatan, untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Di sisi lain, PKH bernuansa pemberdayaan yakni menguatkan rumah tangga miskin agar mampu keluar dari kemiskinannya melalui promosi kesehatan dan mendorong anak bersekolah. Dana yang diberikan kepada RTSM secara tunai melalui Kantor Pos dimaksudkan agar penerima dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan yakni anak-anak harus bersekolah hingga sekolah menengah pertama, anak balita harus mendapatkan imunisasi, dan ibu hamil harus memeriksakan kandungan secara rutin (berkala). Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun 2015 dan PKH mencakup 5 item yakni

pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan (Nainggolan dkk, 2012). Bantuan PKH tepat guna sehingga manfaat dapat dirasakan oleh responden khususnya perempuan dan anak.

c) Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/KPS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014.

Berdasarkan pengakuan responden (perempuan keluarga miskin), pemberian KIP baru didistribusikan tahun 2016 dan dana bantuan belum cair sehingga responden belum menggunakan/memanfaatkan dana tersebut.

d) Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Cakupan manfaat sistem jaminan kesehatan saat ini tergambarkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Layanan kesehatan yang harus dijamin adalah segala pelayanan yang menurut tenaga medis perlu untuk dilakukan terhadap peserta jaminan kesehatan. Manfaat yang bisa didapatkan peserta mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemeriksaan deteksi dini untuk penyakit tertentu dapat diberikan secara berkala kepada peserta yang memenuhi syarat dan disesuaikan dengan paket manfaat jaminan kesehatan. Paket manfaat jaminan kesehatan tersebut haruslah memadai dan sesuai dengan standar pelayanan, sehingga kepuasan peserta terjaga (Bappenas, 2014). Jaminan kesehatan yang diterima penerima bantuan iuran melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Berdasarkan pengakuan responden, pemberian KIS baru didistribusikan tahun 2016. Dalam pendistribusian memiliki kendala karena terdapat rumah tangga yang

sudah terdaftar namun belum menerimanya. Penggunaan KIS sudah dipakai untuk berobat dan gratis secara penuh.

e) Bantuan Langsung Tunai (BLT) & Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

BLSM merupakan bantuan tunai langsung sementara untuk membantu mempertahankan daya beli Rumah Tangga Miskin (RTM) dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM. BLSM disalurkan untuk membantu rumah tangga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, pembelian obat-obatan kesehatan, biaya pendidikan dan keperluan-keperluan lainnya.

BLSM memang bukan solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan, namun merupakan solusi jangka pendek untuk menghindarkan masyarakat miskin dari menjual aset, berhenti sekolah dan mengurangi konsumsi makanan yang bergizi. Evaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan sebelumnya (tahun 2005 dan 2008) membuktikan bahwa program ini telah membantu rumah tangga miskin dan rentan dalam menjaga daya beli setelah kenaikan harga dengan tetap mempertahankan kemampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan (Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi BBM, 2013). Berdasarkan temuan di lapangan, dana BLT dan BLSM tepat digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-sehari di saat adanya kenaikan harga BBM.

## 2. Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat

a) Bantuan sanitasi (jamban sehat)

Fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) merupakan fasilitas pembuangan tinja yang digunakan sendiri atau bersama dan efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit sesuai Kepmenkes No. 852/Menkes/KS/IX/2008. Cakupan masyarakat dengan akses sanitasi yang layak di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2014 sebesar 684.693 jiwa (59,34%). Sementara di kecamatan Suralaga sebesar



11.429 jiwa (69,50%) yang memiliki akses sanitasi yang layak. Sebagian besar masyarakat memperoleh akses sanitasi dengan jenis jamban plengsengan (Bappeda Kab. Lotim, 2015). Berdasarkan pengakuan responden, bantuan jamban sehat dengan jenis plengsengan diberikan pada tahun 2016 dengan gotong-royong pengerjaannya.

b) Bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu/perbaiki rumah)

Bantuan dana Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) merupakan program pemerintah yang berupa bantuan dana untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni. Bantuan dana Rutilahu ini harus dapat tepat sasaran kepada penduduk tidak mampu yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai syarat penerima bantuan dana Rutilahu, sehingga penduduk tidak mampu penerima bantuan dana Rutilahu dapat menerima bantuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, penduduk tidak mampu yang berhak menerima bantuan rumah tidak layak huni ditentukan oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) (Fauzi, 2016). Berdasarkan temuan di lapangan, bantuan Rutilahu pernah diberikan tahun 2000 untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.

c) Pelatihan buta aksara (pendidikan keaksaraan dasar, keaksaraan lanjutan contoh membaca resep)

Pendidikan keaksaraan dasar merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri. Tujuan program adalah untuk memberikan layanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas dengan prioritas usia 15-59 tahun yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia, memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mempercepat penuntasan Penduduk Buta Aksara di Indonesia (Kemendikbud, 2014). Berdasarkan temuan di lapangan, responden diberikan pendidikan selama 1 bulan untuk meningkatkan

kemampuan membaca. Pendidikan ini ditujukan untuk kelompok usia lanjut, karena tidak ada lagi penduduk usia sekolah yang buta huruf.

d) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (PKKPM-P2B)

Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) merupakan program pemerintah sebagai bentuk implementasi salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yaitu pengembangan penghidupan berkelanjutan (P2B) bagi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai kebijakan dan dukungan di tingkat lokal, regional dan nasional dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pengembangan penghidupan masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan adalah pendampingan kelompok mulai dari tahapan pembentukan kelompok, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan hingga pengelolaan/pemasaran, penyaluran dana bergulir melalui kelompok swadaya masyarakat untuk membiayai kegiatan usaha produktif anggota kelompok, pinjaman kepada kelompok yang bentuknya disesuaikan dengan usulan kelompok dan ketentuan program dan penyaluran ke pasar kerja bagi tenaga kerja produktif yang telah memperoleh pelatihan.

Pelaksanaan pilot PKKPM-P2B di Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi 3 wilayah kabupaten, yaitu kabupaten Lombok Utara, kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur dengan lokasi awal di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga dan Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba (Anonim, 2014). Berdasarkan temuan pada kelompok di Kecamatan Suralaga, pemberian dana di Januari 2016. Dana tersebut digunakan untuk usaha pembuatan kerupuk dan membuat kue/cemilan. Dalam kegiatan ini mengalami kendala seperti tidak adanya pembinaan kepada kelompok sasaran sehingga inovasi-inovasi dari produk yang dihasilkan tidak ada dan area pemasaran yang masih terlalu sempit yaitu hanya di sekitar area kecamatan setempat.

e) Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)/PNPM mandiri

Salah satu dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah dana bergulir untuk kegiatan simpan pinjam khusus kelompok perempuan dengan sistem tanggung renteng. Alokasi dana untuk kegiatan ini berjumlah Rp. 5.258.870.500,-. Dana tersebut untuk membiayai kegiatan usaha Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diwadahi dalam 559 kelompok dengan jumlah anggota kelompok 6289 orang. Dana yang sudah disalurkan ke kelompok sebesar Rp. 2.010.060.000,- (alokasi dana Tahun 2007). Kinerja pengelolaan dana bergulir dinilai cukup baik. Hal ini tercermin pada tingkat pengembalian yang mencapai 92,53%. Dana bergulir tersebut telah berkembang menjadi Rp. 2.270.872.100,- atau pertumbuhan modal 12,97% (PNPM Lombok Timur, 2010).

Berdasarkan temuan di lapangan, dana SPP digunakan oleh perempuan untuk membuka usaha seperti berjualan sembako dan dagang jajanan keliling. SPP berjalan dengan lancar dan ada pendampingan, laporan pembukuan rutin juga ada, kelompok perempuan cukup disiplin dalam pengembalian dana sehingga dana tersebut dapat digulirkan untuk kelompok perempuan lain bahkan dana bergulir tidak terserap seluruhnya. Ada beberapa kendala pada kelompok dalam pengembalian modal yaitu apabila ada anggota kelompok yang tidak dapat mengembalikan modal maka ditanggung renteng. SPP memberikan manfaat untuk meningkatkan ekonomi keluarga, memperoleh keterampilan yang berguna, dan sebagai wadah bersosialisasi/komunikasi. Program ini dapat membantu perempuan tanpa menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Secara empiris yang diperoleh dari para TKW, mereka rentan menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang. Dengan adanya SPP dapat menghindarkan perempuan dari tindak kekerasan dan perdagangan orang. Berarti SPP menunjang gerakan *Three Ends Plus* dalam mengakhiri tindak kekerasan terhadap perempuan, perdagangan orang dan kesenjangan ekonomi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Program Penanggulangan Kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran sehingga tujuan program tidak tercapai karena meskipun sudah dilakukan pemutakhiran garis kemiskinan pada tahun 2015, namun penentuan RTM *by name by address* didasarkan pada hasil PPLS 2011.
2. Belum mempertimbangkan data perempuan kepala rumah tangga (PEKA) yang diurutkan pada basis data terpadu (BDT) sebagai sumber data yang digunakan untuk perencanaan program penanggulangan kemiskinan.
3. Sosialisasi tujuan program penanggulangan kemiskinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan masyarakat belum dilakukan secara optimal sehingga di lapangan terjadi kecemburuan sosial (iri hati) seperti pada program Raskin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (berat dan harga tebus).
4. Sudah ada pendampingan program pada tahap perencanaan, tetapi pada tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi belum ada pendampingan secara intensif dan berkelanjutan.
5. Manfaat yang diperoleh perempuan dari Program Penanggulangan Kemiskinan adalah meningkatkan ekonomi keluarga, memperoleh keterampilan yang berguna, dan sebagai wadah bersosialisasi/komunikasi. Sedangkan manfaat bagi anak adalah terpenuhinya kebutuhan sekolah.
6. Program Penanggulangan Kemiskinan menunjang gerakan *Three Ends* yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) yaitu akhiri kekerasan perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi.

#### **B. Rekomendasi**

1. Agar program penanggulangan kemiskinan menjadi berdaya guna dan berhasil guna bagi rumah tangga miskin (RTM) harus dilakukan pemutakhiran data garis kemiskinan

yang diikuti juga dengan pemutakhiran data RTM *by name by address* pada Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS).

2. KPP-PA perlu melakukan advokasi kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) agar dalam proses pembuatan Basis Data Terpadu (BDT) perlu data terpilah dan memperhatikan perempuan kepala rumah tangga (PEKA). Dengan demikian KPP-PA perlu masuk menjadi anggota tim pokja data TNP2K agar terlibat dalam proses pendataan.
3. Perlu adanya sosialisasi tujuan program penanggulangan kemiskinan kepada SKPD dan masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan sosial (iri hati).
4. Perlu adanya pendekatan Perencanaan Peranggaran yang Responsif gender (PPRG) pada setiap tahapan program sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi sehingga tujuan program berdaya guna dan berhasil guna.
5. Perlu dilanjutkan program-program penanggulangan kemiskinan yang memberikan manfaat khususnya kepada PEKA dan anak.
6. KPP-PA diharapkan dapat bekerja sama dengan K/L terkait dalam memberdayakan perempuan usia produktif/kelompok rentan agar dapat meningkatkan ekonomi, mencegah kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014. *Sekilas PKKPM Lombok Timur*. <http://pkkpm Lombok Timur.weebly.com/pkkpm-sekilas.html> ditemukan pada 25 Oktober 2016
- Bappeda Kabupaten Lombok Timur, 2015. *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014*. Lombok: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2011. *Pemutakhiran Data Keluarga*. <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx> ditemukan pada 10 Oktober 2016
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015*. <http://ntb.bps.go.id/> ditemukan pada 17 September 2016
- Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam. 2014. *14 Kriteria Miskin Menurut BPS*. <http://skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/> ditemukan pada 10 Oktober 2016
- Fauzi, Wildan. 2016. *Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Dana Rutilahu Dengan Menggunakan Metode Electre*. <https://fti.uajy.ac.id/sentika/publikasi/makalah/2016/83.pdf> ditemukan pada 25 Oktober 2016
- Hatuina, Abel S., 2015. *Kabar Sedih dari Angka Kemiskinan NTB?.* <http://bappeda.ntbprov.go.id/kabar-sedih-dari-angka-kemiskinan-ntb/> ditemukan pada 1 Oktober 2016
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 2014. *Pendidikan Keaksaraan Dasar dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Program dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat*. [https://www.pauddikmas.kemdikbud.go.id/bindikmas/sites/default/files/documents/files/Keaksaraan%20Dasar%20ok\\_0.pdf](https://www.pauddikmas.kemdikbud.go.id/bindikmas/sites/default/files/documents/files/Keaksaraan%20Dasar%20ok_0.pdf) ditemukan pada 25 Oktober 2016
- Kementerian PPN/Bappenas. 2014. *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat
- Kementerian Sosial RI, 2015. *Sekilas Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

- Nainggolan, Togiartua dkk. 2012. *PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI INDONESIA: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (P3KS) Press
- PNPM Lombok Timur. 2010. *PNPM Perdesaan Lombok Timur*. <http://pnpmlomboktimur.blogspot.co.id/p/tentang-kami.html> ditemukan pada 25 Oktober 2016
- Suharto, E. (Ed.). (2004). *Isu-isu tematik pembangunan sosial: Konsepsi dan strategi*. Jakarta: Balitbangsos Departemen Sosial RI
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Tengah. 2015. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018*. [http://tkpkd.jatengprov.go.id/file/file\\_upload/20151218080357draftspkdjateng.pdf](http://tkpkd.jatengprov.go.id/file/file_upload/20151218080357draftspkdjateng.pdf) ditemukan pada 20 Oktober 2015
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2014. *Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. <http://www.tnp2k.go.id/id/program/klaster-iii-2/> ditemukan pada 5 Oktober 2016
- Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, 2013. *Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013*. Jakarta: Sekretariat TNP2K

## **LAMPIRAN**

### **PANDUAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) (PUSAT)**

1. Adakah Kebijakan terkait dengan bantuan sosial yang dibuat oleh K/L
2. Program bantuan sosial apa sajakah yang telah diberikan untuk Prov. Nusa Tenggara Barat. Jelaskan!
3. Siapakah sasaran Program bantuan sosial tersebut?
4. Sejak kapankah Program bantuan sosial diberikan dan kapan berakhir?
5. Bagaimana mekanisme penyaluran Program bantuan sosial tsb
6. Kementerian/Lembaga mana yang menjadi koordinator Program bantuan sosial tsb?
7. Adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran Program bantuan sosial
8. Apakah dampak dari Program bantuan sosial?
9. Apakah manfaat yang diharapkan dari Pembuat Kebijakan dengan program Bansos?



**PANDUAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)  
(PROVINSI)**

1. Adakah Kebijakan Daerah terkait dengan bantuan sosial bagi keluarga miskin yang dibuat oleh Pemda
2. Program bantuan sosial apa sajakah yang telah diberikan Pusat untuk Prov Nusa Tenggara Barat. Jelaskan!
3. Apakah persyaratan bagi sasaran penerima Program bantuan sosial tsb?
4. Bagaimana mekanisme
5. Adakah petugas pendampingan Program bantuan sosial keluarga miskin untuk Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Apakah ada pemetaan dan jumlah Program bantuan sosial per kabupaten dan jumlah sasaran
7. Sejak kapankah Program bantuan sosial diberikan dan kapan berakhir?
8. Adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran Program bantuan sosial
9. Apakah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bansos, lalu bagaimana hasil
10. Apakah dampak dari Program bantuan sosial?

**PANDUAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)  
(KABUPATEN)**

1. Sepengetahuan Bpk/Ibu/Saudara bantuan tersebut digunakan untuk apa saja?
2. Menurut pendapat Bpk/Ibu/Saudara apakah penggunaan bantuan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup keluarga miskin, khususnya perempuan dan anak (kesehatan perempuan, perlindungan perempuan dan anak terhadap KDRT, ekonomi perempuan , pendidikan anak, hak anak)
3. Mekanisme
4. Adakah lembaga bukan pemerintah yang memberikan bantuan sosial bagi perempuan dan anak keluarga miskin tanpa menuntut imbalan dalam bentuk apapun.
5. Mohon saran dari Bpk/Ibu/Saudara terkait dengan Program bantuan sosial bagi perempuan dan anak keluarga miskin?
6. Manfaat

**PANDUAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)**  
**(KECAMATAN)**

1. Apakah di Kecamatan ini ada Program bantuan sosial bagi perempuan dan anak keluarga miskin?
2. Apakah ada petugas pendamping kecamatan untuk operasionalnya?
3. Apakah ada pemetaan per desa penerima bantuan sosial bagi perempuan dan anak keluarga miskin?
4. Apakah ada pemutakhiran peta penerima bantuan sosial bagi perempuan dan anak keluarga miskin?
5. Sepengetahuan Bpk/Ibu/Saudara bantuan tersebut digunakan untuk apa saja?
6. Menurut pendapat Bpk/Ibu/Saudara apakah penggunaan bantuan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup keluarga miskin, khususnya perempuan dan anak (kesehatan perempuan, perlindungan perempuan dan anak terhadap KDRT, ekonomi perempuan, pendidikan anak, hak anak)



## Kajian BANTUAN SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK PADA KELUARGA MISKIN

*Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Yayasan MeLaTi sedang melakukan kajian mengenai pelaksanaan serta manfaat bantuan social yang diberikan kepada masyarakat.*

*Sehubungan dengan hal itu kami mohon kesediaan Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Mohon Ibu menjawab apa adanya, karena tidak ada jawaban yang salah maupun jawaban yang benar.*

*Kami akan merahasiakan semua jawaban yang ibu berikan.*

*Kami mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik, yang sudah Ibu berikan.*

### DAFTAR PERTANYAAN

Nama : \_\_\_\_\_

Nama suami : \_\_\_\_\_

Alamat : RT RW

Desa : \_\_\_\_\_

Kecamatan : \_\_\_\_\_

Kabupaten : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_ Agustus 2016

- 1) Apakah Ibu pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah?
  - A. Tidak pernah
  - B. Pernah, lanjutkan

Jenis Bantuan Sosial (Pemerintah)	Kapan diterima	Berapa	Digunakan untuk apa	Manfaatnya apa		Saran
				PEREMPUAN (ibu, orangtua perempuan, saudara perempuan kandung)	ANAK	
Program Keluarga Harapan (PKH)						
Kartu Indonesia Sehat (KIS)						
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)						
Kartu Indonesia Pintar (KIP)						
Raskin						
Bantuan fasilitas air bersih (pompa air)						
Bantuan sanitasi (jamban sehat)						

Jenis Bantuan Sosial (Pemerintah)	Kapan diterima	Berapa	Digunakan untuk apa	Manfaatnya apa		Saran
				PEREMPUAN (ibu, orangtua perempuan, saudara perempuan kandung)	ANAK	
Bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu/perbaikan rumah)						
Bantuan dana hibah usaha						
Bantuan fasilitasi peningkatan kapasitas/ pelatihan untuk pemilik rumah penginapan						
Pelatihan buta aksara (pendidikan keaksaraan dasar, keaksaraan lanjutan contoh membaca resep)						
Pendidikan keterampilan seumur hidup/BKM (otomotif, menjahit, memasak, merias, dsb)						
Program pendidikan kecakapan perempuan (PPKP)						
Bantuan peralatan (buku, mesin jahit)						

Jenis Bantuan Sosial (Pemerintah)	Kapan diterima	Berapa	Digunakan untuk apa	Manfaatnya apa		Saran
				PEREMPUAN (ibu, orangtua perempuan, saudara perempuan kandung)	ANAK	
UPPKS						
Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)						
Desa Prima						

Jenis Bantuan Sosial (bukan dari pemerintah)	Pemberi Bantuan	Kapan diterima	Berapa	Digunakan untuk apa	Manfaatnya apa		SARAN
					PEREMPUAN (ibu, orangtua perempuan, saudara perempuan kandung)	ANAK	

Terimakasih







